

## BAB IV

### KESIMPULAN

Sejarah hubungan Turki-Israel sudah dimulai sejak lama, diawali dengan pengakuan Turki sebagai Negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Isarel pada tahun 1949. Berakhirnya Perang Dingin menjadi titik balik proses perkembangan hubungan Turki-Israel. Pada tahun 1996 dan 1997 keduanya bersepakat membuat perjanjian untuk meningkatkan hubungan bilateral diantara keduanya. Perjanjian strategis ditandatangani keduanya pada tahun 1996. Perjanjian tersebut disebut sebagai “*The Military Training Cooperation*” yang dimulai pada Februari 1996. Dalam bidang ekonomi, kerjasama perdagangan antara Turki-Israel dimulai sejak awal tahun 1990-an. Perusahaan Israel mendirikan banyak pabrik di Turki, seperti pabrik dalam sector tekstil dan pada saat yang sama pariwisata keduanya tumbuh dengan cepat. Hubungan keduanya terus berlanjut dengan membentuk berbagai kerjasama baik di bidang pertahanan maupun ekonomi. Namun demikian, hubungan yang cukup harmonis ini seketika berubah saat terjadinya insiden Mavi Marmara pada 31 Mei 2010.

Pada 31 Mei 2010 tentara Israel menyerang Kapal Mavi Marmara yang merupakan kapal yang membawa misi kemanusiaan untuk pengungsi Palestina. Dengan harapan yang baik dari berbagai kalangan, kapal ini berangkat ke Gaza pada bulan Mei dalam rangka menarik perhatian dunia atas embargo tidak sah yang telah dikenakan terhadap Gaza oleh Israel selama lebih dari tiga tahun dan untuk membawa bantuan kepada orang-orang yang tinggal disana. Tujuannya untuk membawa bantuan kepada orang-orang dari Gaza dan agar blokade dapat dihentikan. Namun, saat dalam perjalanan armada ini diserang oleh tentara Israel dengan alasan *self-defence*.

Aksi Israel ini melanggar hak asasi manusia lewat penyerangan ke Kapal Mavi Marmara dan memancing kemarahan dari masyarakat Internasional. Reaksi dan kecaman datang dari berbagai belahan dunia. Terutama Turki, yang langsung memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel serta menarik Duta Besarnya di Tel Aviv . Hal tersebut dilakukan karena 9 orang yang tewas dari total 19 orang di kapal Mavi Marmara tersebut adalah warga Negara Turki. Insiden ini

merupakan titik terburuk hubungan antara Israel dengan Turki yang sudah terbangun sejak puluhan tahun silam.

Pasca insiden terjadi, kerjasama yang sudah dijalin oleh keduanya sejak dulu dibekukan secara sepihak oleh Turki. Turki memutuskan untuk menghentikan kerjasama militernya dengan Israel secara sepihak. Ada beberapa kerjasama yang memang diputus secara sepihak oleh Turki pasca penolakan Israel untuk bertanggung jawab atas insiden Mavi Marmara, diantaranya penghentian suplai persenjataan militer, pembatalan pelatihan militer, penghentian informasi intelijen, dan larangan penerbangan terhadap militer Israel. Pemutusan kerjasama militer tersebut merupakan suatu bentuk dari kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel.

Berdasarkan teori *decision making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin, terdapat tiga faktor yang menjadi pertimbangan suatu Negara untuk mengambil kebijakan luar negerinya yaitu politik domestic, factor ekonomi dan militer juga factor konteks internasional. Jika dilihat dari factor politik domestic, kebijakan luar negeri Turki ini didasari oleh perubahan orientasi kebijakan luar negeri Turki itu sendiri yang sebelumnya, kebijakan luar negeri Turki lebih cenderung mengarah pada dunia Barat, maka pada pemerintahan Erdogan Turki lebih merapat kepada Negara-negara Timur Tengah. Faktor lainnya adalah kerawanan yang ada dalam Negara Turki itu sendiri karena di dalam Negara Turki sendiri terdapat sekelompok pemberontak yang bisa dikatakan sebagai gerakan separatis yang ingin mendirikan sebuah Negara kurdi di wilayah Turki. Dari sisi militer, pemutusan kerjasama militer dengan Israel berkaitan dengan faktor keamanan. Insiden Mavi Marmara merupakan bagian dari ancaman yang membahayakan warga Negara Turki. Dalam hal ini, pemutusan ut dilakukan sebagai akibat dari adanya tekanan-tekanan terhadap keamanan Turki yang dilakukan oleh Israel. Kebijakan ini diambil untuk melindungi Negara atau rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman terhadap system suatu Negara (*Ibid*). Hal yang terpenting dalam pemutusan hubungan militer ini adalah adanya ancaman terhadap keamanan Turki yang dilakukan oleh Israel yaitu terjadinya serangan Mavi Marmara berbendera Turki dan upaya pembunuhan Perdana Menteri Turki oleh Mossad Israel. Sedangkan dalam

konteks internasional, dapat dilihat bahwa sejak pemerintahan Erdogan orientasi kebijakan luar negeri lebih mengarah pada kondisi di Timur Tengah sehingga pemutusan kerjasama ini akan memudahkan Turki untuk mengaplikasikan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah tanpa adanya Israel terutama dalam hal mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, banyaknya kecaman internasional dari berbagai pihak di belahan dunia yang ditimbulkan sebagai reaksi dari insiden Mavi Marmara, membuat Erdogan harus mengambil kebijakan tersebut.

